

Strategi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa)

Dini Safitriani

¹ Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau

Abdul Sadad

² Dosen Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau

Abstrak. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar, hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Oleh karena itu Dinas Sosial sebagai unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dengan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perlindungan, jaminan sosial, pelayanan, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial fakir miskin memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merahabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar PMKS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi penanganan orang dengan gangguan jiwa di Rokan Hilir dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Strategi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) studi kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Rokan Hilir maka bisa diambil kesimpulan dimana Strategi yang saat ini dilakukan Dinas Sosial sudah berjalan, fokus strategi yang dilakukan masih pada rehabilitasi mental dan meskipun program berjalan baik namun ada kendala yang dihadapi yaitu minimnya Dana dan kurangnya partisipasi masyarakat. Hal tersebut dijelaskan di indikator indikator teori Mintzberg, Lampel, Quinn, Ghospal yaitu Tujuan, Kebijakan, Program. Tetapi masih ada faktor penghambat yaitu masih minimnya anggaran untuk penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Rokan Hilir, kurangnya pemahaman masyarakat dalam Program Penanganan ODGJ. Diharapkan kedepannya perlunya meningkatkan kesejahteraan dan dukungan bagi ODGJ ini bertujuan untuk memberikan fokus dalam upaya preventif untuk mencegah masalah kesehatan jiwa, alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir khususnya untuk penangan ODGJ diharapkan dapat lebih optimal dan Dinas Sosial diharapkan dapat melakukan penyuluhan program ODGJ lebih merata.

Kata kunci : penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), studi kasus orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)

Abstract. A person with Social Welfare Problems (PMKS) is a family or community group who due to an obstacle, difficulty or disorder, is unable to carry out their social functions, so that they cannot meet their life needs (physical, spiritual, and social) adequately and reasonably, these obstacles, difficulties and disorders can be in the form of poverty, displacedness, disability, social decency, backwardness, alienation and environmental changes (suddenly) that are lacking supportive, such as the occurrence of disasters. Therefore, the Social Service as an element that organizes local government affairs with the authority of decentralization and deconcentration in the fields of protection, social security, services, social rehabilitation, social empowerment of the poor provides direct services to protect, redability and empower as well as meet the basic needs of PMKS. The purpose of this study is to find out how the strategy of handling people with mental disorders in Rokan Hilir and to find out the inhibiting factors in handling people with mental disorders in Rokan Hilir Regency. This research uses descriptive qualitative methods, and data collection techniques, namely interviews and documentation. The Strategy for Caring for Persons with Social Welfare Problems (PMKS) case study of People with Mental Disorders (ODGJ) in Rokan Hilir Regency, it can be concluded that the Stretegi currently carried out by the Social Service Office is already running, the focus of the strategy carried out is still on mental rehabilitation and although the program is running well, there are obstacles faced, namely the lack of funds and lack of community participation. This is

explained in the indicators of the Mintzberg, Lampel, Quinn, Ghospal theory indicators, namely Objectives, Policies, Programs. But there are still inhibiting factors, namely the lack of budget for handling people with mental disorders (ODGJ) in Rokan Hilir Regency, lack of public understanding of the ODGJ Treatment Program. It is hoped that in the future the need to increase welfare and support for ODGJ aims to provide a focus in preventive efforts to prevent mental health problems, the allocation of funds from the Regional Government of Rokan Hilir Regency, especially for handling ODGJ, is expected to be more optimal and the Social Service is expected to be able to carry out outreach programs for ODGJ more evenly.

Keywords: *people with social welfare problems (PMKS), case studies of people with mental disorders (ODGJ)*

PENDAHULUAN

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Rokan Hilir Masih tinggi serta terbatasnya pemberdayaan kelembagaan sosial yang dilakukan oleh potensi sumber kesejahteraan sosial, hal tersebut menjadi isu-isu strategis yang perlu ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), memberikan Pelayanan langsung untuk memberikan perlindungan PMKS.

Tujuan, sasaran serta Kebijakan (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 yaitu bertujuan meningkatkan kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan sasaran terwujudnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkualitas serta meningkatnya kualitas pelayanan lembaga Kesejahteraan Sosial. Strateginya yaitu peningkatan dan perluasan akses yang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS serta perluasan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Arah Kebijakan memberikan pelayanan dan bantuan stimulan, bantuan sosial lainnya, penguatan modal usaha baik perorangan, keluarga, kelompok/komunitas maupun masyarakat, serta memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan mememberdayakan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar PMKS.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang juga termasuk dalam kriteria ialah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) karena orang yang menderita gangguan jiwa dipastikan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, baik jasmani dan rohani secara memadai. Sebagai bagian dari PMKS, maka penanganan ODGJ yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, sejauh ini hanya difokuskan pada rehabilitasi mental atau jiwa.

Visi dari Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir “Terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kualitas bagi penyandang masalah sosial menuju Kabupaten Rokan Hilir Sejahtera 2016-2021” Penjelasan arti dan makna Visi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud

dias, yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat serta bagi penyandang masalah sosial, mengandung pengertian optimalisasi pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui penanganan dalam panti maupun luar panti, bantuan bagi korban bencana, dan bantuan bagi orang terlantar.

Berdasarkan Visi Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir menjabarkannya ke dalam Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan usaha kesejahteraan sosial, pengetahuan, keterampilan dan manajemen berusaha kepada PMKS
2. Mengembangkan Sistem Jaminan dan Perlindungan Sosial
3. Meningkatkan Profesionalisme dan kualitas SDM pada Dinas sosial

Kesehatan masyarakat merupakan asset yang paling berharga bagi sebuah Daerah begitu juga dengan kesehatan mental masyarakatnya agar mampu menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Kabupaten Rokan Hilir masalah orang dengan kesehatan mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih banyak dijumpai dijalanan, orang dengan gangguan jiwa tentu saja meresahkan masyarakat terlebih lagi mereka sudah mulai mengganggu ketenangan masyarakat, mulai dari yang berkeliaran sembari membawa senjata tajam (sajam) maupun benda tumpul sehingga berkemungkinan membahayakan masyarakat, ada juga orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran setengah porno yang berkeliaran di jalanan. Keluarga orang kurang waras kebanyakan tidak peduli dan tidak mampu mengurus karena keterbatasan ekonomi untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Membaca apa yang diamanatkan Undang Undang No. 36 Tahun 2009, maka pada pasal: 149 ayat (1) “penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/ atau orang lain/ atau keamanan mengganggu ketertiban dan/ atau keamanan umumwajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitasi pelayanan kesehatannya”.

Pada pasal; 149 ayat (2) “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/ atau orang lain, dan/ atau mengganggu ketertiban umum”, sedangkan pada pasal; 149 ayat (4), sepertinya makin dipertegas dengan jelas yang bunyinya; “ tanggung jawab Pemerintah dan

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin”.

Dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 37 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Orang Dengan Gangguan Jiwa Masuk dalam daftar Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Masyarakat tersebut dimana disebutkan bahwa setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 Kedudukan tugas Dinas Sosial adalah sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang sosial dan Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial secara umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantuan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana Strategi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan Studi Kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Dinas Sosial sebagai pengemban tugas mengenai masalah sosial di Kabupaten Rokan Hilir mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti ini dengan beberapa kendala yang di hadapi di lapangan.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci pengumpulan data, serta penafsiran data yang ada. Oleh karna itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Alat atau instrument dari pengumpulan data pada penelitian ini merupakan manusia atau peneliti sendiri yang dimana dilakukan pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen.

HASIL PEMBAHASAN

Strategi Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Rokan Hilir (studi kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa) pada indikator Tujuan melalui Program PMKS oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir melihat bahwa tujuan program PMKS yaitu

memastikan tujuan dari program ini memiliki tujuan yang jelas untuk mensejahterakan masyarakat yang masih memiliki masalah dalam kesejahteraan sosialnya. Sebagaimana yang di paparkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin bahwa tujuan utama dari program ini untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan PMKS di Kabupaten Rokan Hilir melalui aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan jaminan serta perlindungan PMKS juga diperhatikan selain itu kemandirian PMKS juga menjadi tujuan penting karena bisa mencapai kesejahteraannya sendiri serta Dinas Sosial Sebagai wadah penyelenggaraan program PMKS. Meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial makdusnya adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah yaitu Rokan Hilir dan masyarakat dalam bentuk pelayanan Sosial guna memenuhi kebutuhan setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial.

Sasaran yang ingin di tuju tentu saja memberikan dukungan, perlindungan, dan layanan bagi PMKS baik kelompok rentan maupun kelompok beresiko sosial dalam menghadapi permasalahan seperti kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial. Meningkatkan kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar. Tujuan lainnya juga tentunya meningkatkan Organisasi Sosial dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir dalam pelayanan sosial terhadap PMKS serta meningkatkan kemampuan penyandang cacat dalam melaksanakan fungsi sosial secara wajar dan meningkatkan perubahan perilaku Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan terlaksananya pelayanan dan bantuan sosial secara cepat dan tepat kepada PMKS serta meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan public.

KESIMPULAN

- 1). Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai Strategi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) studi kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Rokan Hilir maka bisa diambil kesimpulan dimana Strategi yang saat ini

dilakukan Dinas Sosial dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa ini sudah berjalan, focus strategi yang dilakukan masih pada rehabilitasi mental.

- 2). Meskipun program berjalan baik namun ada kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam menjalankan program ini yaitu minimnya Dana yang berasal dari APBD Daerah dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program ini. Masyarakat awam menganggap ODGJ adalah sebuah aib bagi keluarganya sehingga memilih untuk tidak melaporkannya kepada Dinas Sosial untuk diberi penanganan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, D dkk. (2018). Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulannya: Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat 9 (1), 1-10
- Depkes RI. 2014. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013. Jakarta: Depkes RI.
- Dev “Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hilir” diakses dari <http://rokankab.go.id/pages/visi-dan-misi> , pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 22:28
- Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 37 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas dan Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir
- Prabowo,A. (2019). *Strategi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam rangka menaggulangi dan membina gelandangan pengemis dan anak jalanan*, dalam Skripsi Universitas Bhayangkara Surabaya.
- rsjmenur.jatimprov.go.id “Pengertian Gangguan Jiwa” diakses dari <http://rsjmenur.jatimprov.go.id/post/2020-07-28/pengertian-gangguan-jiwa> , pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 22:45
- riau.go.id” Kabupaten Rokan Hilir” diakses dari <http://riau.go.id/home/content/23/kab-rokan-hilir> , pada tanggal 15 Desember Pukul 21:38
- Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021
- Sugiyono,2016.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta,
- Suhardono dan Edy.1994. *Teori Peran (Konsep, Derivasi, dan Implikasinya)*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
- Bungin dan Burhan.2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk studi Sosiologi, Kebijakan Publik, 1 kasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta:Kencana Prenadamedia Grup
- Soekanto dan Soerjono. 1982. *Sosiologi:Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suharto dan EDI. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik-Peran Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Sejahtera*. Bandung: Alfabeta.
- Yumilah, A., & Misnaniarti., & Marisa, R. “Analisis situasi kesehatan mental pada masyarakat di Indonesia dan strategi penggulungannya.” Jurnal